

WACANA KESETARAAN GENDER

Nur Syamsiah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Abstract

Gender, according to Feminist, does not relate to nature, but it is about social construction of being men and women. It relates to the role, function, position, access and responsibilities of women and men. Gender is influenced by culture, religion, socio-politic, economy, law, and education and it will be changed over the place and time. In this context, religion has been used in social and cultural construction. For the long history, gender is believed as nature and is dictated by God in which cannot be changed. From gender perspective, men and women are similar in their roles and obligations as it is also justified by Islam. The only difference between men and women is 'taqwa' (Pious).

Dengan kata lain, konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, agama, sosial, politik, ekonomis, hukum dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi.

Gender dalam arti feminin dan maskulin dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan budaya tidak dibedakan dalam hal penilaian, keutamaan maupun penghargaan. Bahkan dalam bidang agama (Islam) pun gender dalam arti yang dimaksud di atas tidak dibedakan, yang membedakan seseorang hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah. Jadi gender yang dimaksud di sini adalah perbedaan jenis kelamin secara sosial, bukan ditinjau dari persoalan seks.

Kata kunci : Gender

PENDAHULUAN

Kata gender –ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada pelafalannya- berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”.¹ Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”²

Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³

Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.⁴ Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, *sex*,⁵ atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab.⁶ Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir.

Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para feminin dan pemerhati perempuan. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁷ Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang kaum feminis pada umumnya seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983, h. 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian *gender* disamakan pengertiannya sama dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²*The apparent disparity between man and women in values and behaviour*. Lihat Victoria Neufeldt (ed.), *Webster’s New World Dictionary*, (New York: Websters New World Cleveland, 1984), h. 561.

³Helen Tierney (ed.), *Woman’s Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press), h. 153.

⁴Mengingat istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika perbendaharaan kata di Indonesia, maka istilah tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun, istilah ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulis dengan huruf italic karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata gender menjadi jender.

⁵Peter Salim, *Advance English-Indonesia Dictionary*, edisi ketiga (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 384.

⁶Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Cet. III; London: McDonald & Evans Ltd, 1980), h. 141. Lihat pula Munir Ba’albakiy, *al-Maurid: Qamus Injilizhiy Arabiy* (Beirut: Dar al-’Ilm li al-Malayin, 1985), h. 383.

⁷Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, h. 4.

penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁸

H.T. Wilson dalam *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁹ Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.¹⁰

Julia Cleves Musse dalam bukunya *Half the World, Half a Chance* mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa dia adalah feminine atau maskulin.¹¹ Suke Silverius memberi pengertian tentang gender sebagai pola relasi hubungan antara laki-laki dan wanita yang dipakai untuk menunjukkan perangkat sosial dalam rangka validitasi dan pelestarian himpunan hubungan-hubungan dalam tatanan sosial.¹²

Ivan Illich¹³ mendefinisikan gender dengan pembeda-pembeda tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dalam budaya sosial.¹⁴ Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "*gender*". Gender diartikannya sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender

⁸Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall), 1990), h. 2.

⁹"Gender is a basis for defining the different contributions that man and woman make to culture and collective life by dint of which they are as man and woman". Lihat H.T Wilson, *Sex and Gender, Making Culture Sense of Civilization*, (Leidan, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill), 1989, h. 2.

¹⁰Lihat Elaine Showalter (ed), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), h. 3.

¹¹Lihat Julia Cleves Mosses, *Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, terjemahan Hartian Silawati dengan judul *Gender dan Pembangunan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3.

¹²Lihat Suke Silberius, *Gender dalam Budaya Dehumanisasi dari Proses Humanisasi*, Kajian Dikbud, No. 013, Tahun IV, Juni 1998, <http://www.gender.or.id>.

¹³Illich dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah gender dalam analisis ilmiahnya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat yang tidak hanya terbatas pada penggunaan jenis kelamin semata. Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Perspektif Islam: Studi terhadap Hal-Hal yang Memperkuat dan Melemahkan Gender dalam Islam" dalam Mansour Fakih et.al, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. I: Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 23.

¹⁴Ivan Illich, *Gender*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul *Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 3.

biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.¹⁵

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah sebuah konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat biologis. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. Pertama, diartikan sebagai “seks¹⁶ atau jenis kelamin” yang pada akhirnya kita mengenal “jenis kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural atau psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender. Jadi gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya.

PEMBAHASAN

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Psikoanalisa/Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.

¹⁵Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992, h. 3.

¹⁶Seks : alami, bersifat biologis, Tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, dan merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Gender : Bersifat sosial budaya, Bisa berubah, bisa dipertukarkan, tergantung musim, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan masyarakat. Lihat Bashin Kamla, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. (Cet. I; Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996), h. 20

Pertama, *id*, sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Id* bagaikan sumber energi memberikan kekuatan terhadap kedua struktur berikutnya. *Id* bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. Kedua, *ego*, bekerja dalam lingkup nasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Ego* membantu seseorang keluar dari berbagai problem subyektif individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, *superego*, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan. *Superego* juga selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*.¹⁷

Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *id* lebih menonjol maka diri yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *id* lebih menonjol maka yang bersangkutan cenderung hedonistis. Sebaliknya, jika *superego* lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.

Perkembangan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu diantara apa yang disebut Freud dengan "lima tahapan psikoseksual". Pada setiap tingkat terdapat kepuasan seksual, yang oleh Freud dianggap sebagai kepuasan insting seksual, dihubungkan dengan anggota badan tertentu.

Kedua lingkaran psikoseksual itu ialah seperti berikut. Pertama, tahap kesenangan di mulut (oral stage), terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi. Kesenangan seorang bayi ialah mengisap susu melalui mulut. Kedua, tahap kesenangan berada di dubur (anal stage), yaitu tahun kedua seorang bayi, memperoleh kesenangan disekitar dubur, yaitu ketika sang bayi mengeluarkan kotoran. Ketiga, tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya (phallic stage), yaitu seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. Keempat, tahap remaja (talency stage), yaitu kelanjutan dari tingkat sebelumnya, ketika kecenderungan erotis ditekan sampai menjelang masa pubertas. Kelima, tahap puncak kesenangan terletak pada daerah kemaluan (genital stage), yaitu saat kematangan seksualitas seseorang.¹⁸

Menurut Freud sejak tahap phallic, yaitu anak usia antara 3 dan 6 tahun perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan.

¹⁷Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, h. 40.

¹⁸Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, h. 41.

Dalam masa ini seorang anak mengenali perbedaan anatomi tubuhnya terutama di daerah kemaluan, karena pada masa ini seorang anak laki-laki dan perempuan akan merasakan kenikmatan ketika memainkan kelaminnya. Sejak masa inilah anak perempuan mulai menyadari bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang kurang dibanding laki-laki. Menurut Freud, kenyataan bahwa seorang anak laki-laki mempunyai alat kelamin menonjol yang tidak dimiliki oleh perempuan, menimbulkan masalah kecemburuan alat kelamin yang mempunyai implikasi lebih jauh; anak laki-laki merasa superior dan anak perempuan merasa inferior.¹⁹

Pola hubungan ayah dan ibu yang sehari-hari disaksikan oleh seorang anak semakin memperkuat kesan itu. Ibu dimata seorang anak adalah inferior karena ia tidak mempunyai penis, sementara bapaknya dianggap hebat karena mempunyai penis. Anak laki-laki mengidentifikasi diri dengan ibunya. Identifikasi itu mengacu persamaan anatomi biologis.

Bagi anak laki-laki, kecemasan dan kesusahan hidup yang dialaminya diselesaikan melalui pengembangan superego, yang oleh Freud dianggap sebagai sasaran yang dapat dicapai dalam evolusi mental manusia. Sementara perempuan ada masalah dalam hal ini karena ia mempunyai superego yang lemah sebagai akibat apa yang disebut Freud dengan perkembangan keinginan untuk dikebiri, karena kasus kecemburuan alat kelamin tadi. Itulah sebabnya, menurut Freud, perempuan lebih pencemburu, lebih mencintai dirinya sendiri (narsisme), dan lebih pasif daripada laki-laki. Bagi Freud, konflik antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan masalah psikologis, tetapi lebih merupakan perbedaan biologis. Sementara itu, biologi menurut Freud adalah masalah takdir yang dapat diubah.²⁰

Pada tahap phallic, seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia mulai melihat ayahnya sebagai saingan, karena ia ingin memperoleh kasih sayang dari ibu yang melebihi kasih sayang yang diperoleh ayahnya. Suatu ketika anak tersebut tidak sanggup memperoleh kasih sayang ibu, maka seketika itu tertanam di alam bawah sadarnya bahwa ayahnya adalah saingan. Namun karena itu takut dikebiri oleh ayahnya, karena ia masih berada ditahap phallic "tahap puncak kesenangan berada dipenisnya", maka ia tidak bisa melawan ayahnya. Meskipun demikian, seorang anak laki-laki merasa bangga karena tidak semua orang mempunyai

¹⁹ Kesimpulan ini dapat dipahami melalui pernyataan Freud sebagai berikut: *she has seen it and knows she is without it and wants to have it. ... The hope someday obtaining a penis in spite of averything and so of becoming like a man may persist to incredibly late age and may become a motive for the strangest and otherwise unaccountable action. Or again, a proces may set in which might be described as a "denial" ... a girl may refuse to accepy the fact of being castrated, may harden her self in the conviction that she does posses a penis and may subsequently be compilled to behave as though she were a man.* (lihat Sigmund Freud, "Some Psychological Consequences of Anatomical Distinction Between the Sexes," dalam J. Strachey (ed.), *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, (London: Hogart Pressa and the Institute of Psycho-Analysis), Vol. 19, h. 31-32.

²⁰Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 29.

penis termasuk ibunya. Pada akhir tahap ini ia akan kembali mengidentifikasi ayahnya, bukan lagi sebagai saingan (rival) tetapi ia menerimanya sebagai idola (model).

Sebaliknya, anak perempuan, ketika ia melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah terkebiri. Ia mengalami perkembangan rasa rendah diri. Ia secara tidak sadar menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati.

Tentu saja pendapat Freud tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan feminis, terutama karena tanpa rasa malu ia mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan. Namun demikian, para feminis tidak perlu menanggapi secara emosi dan berlebih-lebihan karena temuan Freud itu diperoleh melalui penelitian ilmiah. Cara terbaik dalam menghadapi teori ini ialah dengan melakukan penelitian tanggapan untuk membuktikan kelemahan teori Freud. Teori Freud mestinya diambil hikmahnya agar perempuan berbuat sesuatu yang lebih berdaya guna, dan sekaligus membuktikan kekeliruan Freud.

Teori prikoanalisa Freud sudah banyak didramatisir kalangan feminis. Freud sendiri sebenarnya sudah memperingatkan kalau pendapatnya itu masih tentative dan masih terbuka untuk dikritik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan kaum perempuan. Sikap feminis yang akademisi seperti Nancy Chodorow dan Juliet Mitchell dapat dinilai bijaksana, karena tidak serta merta menolak teori Freud tetapi berupaya menyempurnakan metode analisa yang digunakan Freud di dalam menarik suatu kesimpulan.²¹

Sikap yang sama telah dilakukan pula oleh Karen Horney, seorang ahli psikoanalisa yang tergabung di dalam Freud's Circle, suatu kelompok yang menaruh perhatian khusus terhadap teori Freud, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan Freud. Ia berpendapat bahwa bukan karena kecemburuan alat kelamin perempuan berkembang menjadi lebih rendah, melainkan rasa takut yang mengendap dalam bawah sadar perempuan terhadap kelecetan vagina ketika terjadi penetrasi atau masturbasi. Selain itu juga menekankan peranan rahim yang kompleks bagi perempuan. Jadi antara Freud dan Horney terdapat persamaan mendasar, yaitu keduanya menekankan faktor anatomi biologi. Bedanya, Freud menitikberatkan pada faktor penis (*phallogentric*) dan Horney menitikberatkan faktor rahim (*gynocentric*).²² Hanya saja Horney tidak mengecualikan faktor kultur dalam pembentukan kepribadian. Horney memungkinkan terjadinya interaksi antara kultur dan kekuatan internal (*inner dynamic forces*) di dalam pembentukan kepribadian. Berbeda dengan Freud yang semata-mata mendasarkan pandangannya kepada faktor biologi.

2. Teori Fungsionalis Struktural

²¹Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 30.

²²Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, h. 45.

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.

Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilary M. Lips dan S.A. Shield.²³ Teori strukturalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis. Namun menurut Linda L. Lindsey, kedua teori ini mempunyai kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi gender. Pendapat Lindsey menampilkan alasan yang lebih logis dibanding pendapat sebelumnya.

R. Dahrendorf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip teori ini sebagai berikut:

- a. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian;
- b. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol;
- c. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama;
- d. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur;
- e. Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.²⁴

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektifitas consensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas yang wajar, dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau menurut istilah Talcott Parsons dan Robert Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan.²⁵

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada diluar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan telah berhasil menciptakan kelangsungan

²³Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, h. 53.

²⁴Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 5, 39.

²⁵Talcott Parson & Robert Bales (Eds.), *loc.cit.*

masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin (sex).

Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parson dan Bales, dua tokoh pendukung utama teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*), membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the work outside the home*). Sementara itu, istri-ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.²⁶

Salah satu kritik yang dapat dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu terlalu terikat kepada kenyataan masyarakat pra-industri. Padahal, struktur dan fungsi di dalam masyarakat kontemporer sudah banyak berubah. Keluarga dan unit rumah tangga telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Kalau dahulu sistem masyarakat lebih bersifat kolektif, keluarga pun masih bersifat keluarga besar (*extended family*). Tugas dan tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama oleh keluarga besar tersebut. Masalah anak tidak hanya diurus oleh ibunya, tetapi oleh semua anggota keluarga yang ramai-ramai tinggal dalam sebuah rumah. Lain halnya dengan masyarakat belakangan ini, keluarga inti (*nuclear family*) semakin meluas di dalam masyarakat dan sudah menjadi salah satu ciri masyarakat modern. Munculnya orang tua tunggal (*single parents*),²⁷ suatu fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat modern, menarik dikaji secara khusus karena fenomena ini tidak umum ditemukan atau bahkan tidak ditemukan sama sekali dalam masyarakat tradisional.

Sehubungan dengan perubahan struktur keluarga, menarik untuk diperhatikan F. Ivan Nye, yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi dan peran suami-istri kepada lima kelompok yaitu:

1. Segalanya pada suami;
2. Suami melebihi peran istri;

²⁶*Ibid.*, h. 6.

²⁷*Single parent* adalah ibu atau ayah yang berfungsi sebagai orang tua tunggal seorang atau beberapa orang anak. Boleh jadi karena anak itu tidak jelas ibu bapaknya sebagai akibat pergaulan bebas, atau akibat perceraian, atau salah satu di antara kedua orang tuanya hilang atau meninggal dunia.

3. Suami dan istri mempunyai peran yang sama;
4. Peran istri melebihi suami;
5. Segalanya pada istri.²⁸

Apa yang dikemukakan Ivan Nye di atas, selain menunjukkan betapa besar perbuatan yang sedang terjadi di dalam masyarakat juga menunjukkan betapa besar tantangan teori ini di masa-masa yang akan datang. Pembagian fungsi dan peran antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan) dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (*meritokration*). Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan.

Menurut Lips ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu:

1. *Kekuasaan dan Status*

Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi daripada perempuan. Di antara pakar tersebut ialah Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. Tidak heran kalau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar di dalam masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status lebih besar.²⁹

Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran kalau di dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender.

2. *Komunikasi Non-Verbal*

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Nancy Henley dan J. Freman sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai maka masyarakat (laki-laki) cenderung memandang "rendah" terhadapnya. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki

²⁸F.Ivan Nye, *Role Structure an Analisis of the Family*, California & London: Sage Library of Social Research, 1976., h. 16

²⁹Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 50.

lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan daripada sebaliknya. Situasi seperti ini dianggap S. Weitz sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam menentukan lazim atau tidaknya sesuatu adalah norma (yang ditentukan oleh) laki-laki, seperti pernyataan sinis yang diberikan oleh Carol Tavris dalam bukunya yang terkenal *Mismeasure of Woman*, "Laki-laki adalah tolak ukur segala sesuatu" (*man is of measure of all things*). Lebih jauh Tavris mengungkapkan, "laki-laki dianggap manusia normal (*normal human being*), dan perempuan dianggap "abnormal" karena ia berbeda dengan laki-laki. Akibatnya, kata Tavris, perempuan bukan saja menerima status subordinasi tetapi juga terjadi feminisasi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan.³¹

3. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi diperhatikan secara khusus oleh Robeth Moss Kanter's. menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.³²

4. "Rape-Prone" dan Rape-Free"

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan diperkosa (*rape-free*). Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki, dalam arti perempuan tidak dapat melakukan pemaksaan untuk berhubungan seks pada seseorang laki-laki yang tidak ereksi. Kemampuan untuk berereksi bagi seorang laki-laki hanya ada dalam kondisi prima. Dalam situasi psikologis yang tertekan, apalagi dalam keadaan diancam, seorang laki-laki tidak mungkin ereksi.³³ Berbeda dengan perempuan yang dalam keadaan bagaimanapun organ seksualnya memungkinkan untuk melakukan coitus, meskipun dengan resiko pendarahan atau efek negatif lainnya.

Dari sudut pandangan ini, disadari atau tidak, laki-laki mendapatkan keuntungan dari pola relasi gender, walaupun keadaannya sangat terkandung pada setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang mempertahankan norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan. Akan

³⁰Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 51.

³¹Carol Tavris, *Mismeasure of Woman*, (New York: Touchstone, 1992), h. 17.

³²Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 51.

³³Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, h. 52.

tetapi dalam masyarakat yang cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya.

5. Pembagian Kerja

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pula dalam pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat tradisional mengenal pembagian kerja seksual, laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*), maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan menjadi sekertaris dan laki-laki sebagai pemimpin. Dalam dunia sains, perempuan sebagai operator laboratorium dan laki-laki sebagai saintis. Urusan-urusan produkif seolah-olah menjadi tugas laki-laki dan urusan reproduksi dan kerumah tanggaa adalah tugas perempuan. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

Teori fungsionalis struktural mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktek yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki dikonsepsikan bertugas untuk mengurus urusan luar (*external world*), dan perempuan bertugas untuk mengurus urusan internal (*internal world*), lebih jauh perempuan dipolakan untuk lebih banyak terlibat dalam urusan reproduksi.

Teori ini memang pernah sangat populer di sekitar tahun 1950-an, ketika bangsa-bangsa mengalami depresi dan kejenuhan karena Perang Dunia I dan II. Masyarakat berupaya memulihkan kestabilan dalam masyarakat tidak dengan jalan perang, melainkan memfungsikan kembali unsur-unsur penting dalam sistem kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern, atau menurut istilah Sylvia Walby "keluarga Barat pasca-perang" (*Post-war Western Family*), teori fungsionalis struktural sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana halnya penulis perempuan lainnya, Sylvia Walby mengecam dengan tajam teori ini dengan menyimpulkan bahwa teori ini dengan sendirinya akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern.³⁴ Lindsey menilai teori ini secara ideologis telah digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap kelanggengan dominasi laki-laki dan seolah-olah teori ini dianggap menjadi jawaban terhadap lestarnya stratifikasi gender di dalam masyarakat.³⁵

Meskipun telah dijelaskan kelemahan-kelemahan pendapat ini, pada kenyataan masih sulit dihapuskan di dalam kehidupan bermasyarakat modern. Pembagian fungsi yang mengacu kepada perbedaan anatomi biologis masih sulit ditinggalkan. Dalam kenyataannya masyarakat industri dan masyarakat liberal cenderung tetap mempertahankan pendapat ini karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Tentu saja pendapat ini menimbulkan kritik dari kalangan feminis karena teori ini tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal.

³⁴Sylvia Walby, *Teorizing Patriarchy*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), h. 64 .

³⁵Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective.*, h. 6.

Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan, seperti nilai etika dan kesusilaan, cenderung diabaikan. Tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar, sebagaimana halnya industri-industri lain. Lapangan kerja tabu ini akan menjadi alternatif bagi mereka yang tidak punya akses, yaitu mereka yang tidak punya modal, pengetahuan keterampilan, dan koneksi. Perempuan secara umum akan menjadi lebih rendah dari pada laki-laki karena selain secara fisik lebih kuat, jam kerja laki-laki juga lebih teratur. Laki-laki tidak harus terganggu oleh faktor reproduksi seperti siklus menstruasi, kehamilan dan menyusui.

Teori fungsionalis struktural walaupun tidak dalam formatnya semula cenderung masih tetap bertahan. Hal ini menurut Michel Foucault³⁶ dan Heidi Hartman³⁷ karena masyarakat modern kapitalis cenderung mengakomodir sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jauh sebelumnya Claude Levi-Strauss telah memprediksi bahwa dalam era masyarakat industri posisi perempuan akan tetap pada posisi lebih rendah dan marginal, karena sejak awal pembentukan masyarakat diasumsikan pada posisi subordinasi. Sejarah subordinasi perempuan dibahas secara terperinci di dalam beberapa karyanya.³⁸

3. Teori Konflik

Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.

Marx yang kemudian dilengkapi oleh Frederich Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creative*), tetapi konstruksi masyarakat (*social construction*).

³⁶Dalam berbagai karyanya, Foucault selalu mempermasalahkan bentuk-bentuk penindasan yang berlanjut di dalam masyarakat modern, satu di antaranya ialah penindasan berdasarkan jenis kelamin. Lihat misalnya Michel Foucault, *The History of Sexuality : An Introduction*, (New York: Pantheon), 1978.

³⁷Heidi Hartman, *Capitalism, op. cit.*, h. 71.

³⁸Lihat misalnya, Claude Levi-Strauss, “The Family” dalam Harry L. Shapiro, *Man Culture and Society*, (New York: Oxford University Press), 1971.

Menurut Engels, masyarakat primitif lebih bersifat egaliter karena ketika itu belum dikenal adanya surplus penghasilan sehingga belum dikenal adanya pemilikan pribadi. Bentuk-bentuk keluarga dalam masyarakat primitif ditandai dengan penerangan sistem produksi untuk digunakan sendiri. Rumah tangga bersifat komunal, semuanya dilakukan untuk rumah tangga sebagai keseluruhan. Perempuan sebagai anggota rumah tangga mempunyai kontribusi yang sama dengan laki-laki dalam rumah tangga.

Surplus penghasilan mulai dikenal ketika hewan piaraan mulai didayagunakan dan para petani sudah menetap disuatu tempat, tidak lagi berpindah-pindah (*nomaden*). Bersamaan dengan itu sarana pemilikan pribadi mulai dikembangkan, dan kekuasaan mulai terkonsentrasi pada segelintir laki-laki. Setelah pemilikan pribadi diperkenalkan dan diperkenankan, maka muncul konsep kapitalisme yang mentolerir terjadinya akumulasi modal di kalangan orang-orang terbatas. Akumulasi modal kemudian menjadi dasar lahirnya sistem perdagangan. Selanjutnya produksi untuk perdagangan yang dikuasai oleh laki-laki mendominasi produksi untuk barang-barang konsumsi hal mana perempuan banyak terlibat di dalamnya. Akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari harta dan sejak itulah dominasi laki-laki dimulai. Perempuan terkondisikan untuk bekerja di sektor domestik dan laki-laki bekerja dan mengontrol sektor publik. Di samping itu, rumah tangga berada di bawah otoritas dan kewenangan suami.³⁹

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.

Jika benar generasi Engels tersebut, maka ada satu hal yang dapat disangsikan, yaitu kontrol laki-laki atas produksi di dalam masyarakat yang terbagi-bagi kedalam beberapa kelas, adalah karena kepentingan kelas borjuis. Lagi pula, menurut Marxisme, persoalan relasi gender yang timpang di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan revolusi sosial untuk menghapuskan pembagian pekerja domestik. Banyak faktor lain yang terlibat di dalam pembentukan stereotip gender di dalam masyarakat.

Menurut Marxisme, dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan. Pertama, eksploitasi perempuan di dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. Kedua, perempuan juga berperan dalam produksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja lebih murah. Murahnya upah tenaga kerja menguntungkan kapitalisme. Ketiga, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih murah yang menciptakan 'buruh cadangan'. Melimpahnya buruh cadangan memperkuat posisi tawar-menawar para pemilik modal

³⁹Friedrich Engels, *op.cit.*, h. 41-43.

(kapitalis) dan mengancam solidaritas kaum buruh. Kesemuanya ini akan mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis.⁴⁰

Teori konflik mendapat kritik dari sejumlah ahli, karena terlalu menekan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan Randall Collins, yang dikenal mendukung teori konflik modern, tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx dan Engels. Menurut mereka, konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.⁴¹

4. Teori Feminis

Perbedaan pokok antara kaum feminis dahulu dengan sekarang adalah bahwa, dahulu perjuangan dilakukan demi hak-hak demokrasi perempuan, meliputi hak atas pendidikan, pekerjaan, hak pemilikan, hak pilih, hak menjadi anggota parlemen, hak atas pengaturan kelahiran, hak atas perceraian, dan sebagainya. Dengan kata lain, kaum feminis dahulu telah berjuang demi perbaikan hukum, demi kedudukan yang sama atau setara secara hukum di dalam masyarakat. Pada hakekatnya perjuangan mereka berada di luar rumah serta keluarga.

Kini, kaum feminis berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan reproduksi. Lagi pula, femininitas dan maskulinitas adalah kategori yang saling terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis.

Dengan demikian, pada hakikatnya feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminis dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

⁴⁰Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 57.

⁴¹Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective.*, h. 7.

Perbedaan tersebut secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, sebagai berikut:

a. *Feminisme Sosialis*

Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminis yang berorientasi sosialisme. Feminis sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkhi.⁴² Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egalier, atau tanpa hirarki horisontal.

Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan teori dan ideology, mereka melihat kedudukan kaum perempuan identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi.⁴³

Feminis sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, menurut mereka pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana dominasi tersebut dibentuk oleh proses kapitalisme.

Marx dan Engels melihat kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan pada seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memang tidak menghasilkan uang atau materi. Oleh karena itu perempuan dianggap interior sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu, Engels memberikan solusi untuk membebaskan perempuan dari penindasan dengan mengajak perempuan untuk masuk ke sektor publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ihromi bahwa, "satu hal yang juga perlu diingat bahwa, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah selalu pencari nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala pekerjaan reproduktif maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah tangga."⁴⁴ Dalam hal ini, laki-laki dianggap superior karena ia yang bekerja mencari uang. Untuk itu, istri dalam keluarga, agar tidak dilakukan semena-mena oleh suami, maka istri harus berpartisipasi dalam sektor publik secara produktif (menghasilkan uang).

Transformasi sosial diharapkan akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi para perempuan untuk menciptakan kesetaraan atau keadilan yang diinginkan.

Aliran ini mengkritik kaum feminis radikal karena tidak mengkaitkan patriarkhi dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat. Dengan demikian aliran ini memperhatikan keanekaragaman untuk patriarki dan

⁴²Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999) h.133.

⁴³Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, h. 128.

⁴⁴Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, h. 132.

pembagian kerja seksual, karena menurut mereka, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari modus produksi masyarakat tersebut. Mereka juga mengkritik kaum sosialis yang tidak memperhatikan gender dalam proses kapitalisme.

b. Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai tujuan yang sama dengan teori feminis-feminis lainnya, mempunyai pandangan berbeda terhadap aspek biologis (*nature*). Feminisme radikal berpendapat bahwa, ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan.⁴⁵ Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi keluarga, di mana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis. Karenanya, para feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan laki-laki sehingga perempuan ditindas.

Aliran ini berpendapat bahwa, struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan ini menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain. Jegger menyebutkan bahwa, menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan lain-lainnya.

Kaum feminis radikal menanggapi dua konsep yang dianggap penting yaitu, patriarki dan seksualitas. Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber untuk mengacu ke sistem politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam rumah tangga dapat mendominasi anggota keluarga dan menguasai produksi ekonomi dari kesatuan kekerabatan.⁴⁶ Kaum feminis radikal mengacu ke aspek sistemik dari subordinasi perempuan sebagai akibat adanya patriarki.

Ideologi patriarki yang mengobyekkan seksualitas perempuan dapat tampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari, seperti perkosaan, pornografi iklan di media massa.

Feminis radikal cenderung menganggap bahwa makhluk laki-laki sebagai individu maupun kolektif dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa saja yang berkaitan

⁴⁵Lihat T.O.Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 216.

⁴⁶Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, h.178.

dengan makhluk laki-laki adalah pasti negatif dan menindas, karenanya perlu di jauhi. Antipati kaum feminis radikal terhadap makhluk laki-laki membuat mereka ingin memisahkan diri dari budaya kelompoknya sendiri.

Feminisme radikal banyak dikritik oleh para feminis sendiri yang pro terhadap orientasi kultur (*culture orientation*). Dikatakan bahwa, teori feminisme radikal terlalu bertumpu kepada orientasi biologis dan lupa bahwa ada pengaruh kultur dalam pembentukan konsep gender.

c. *Feminisme Liberal*

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Angelina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906).⁴⁷

Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18 bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” (*enlightenth atau age of reason*). Dasar yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang natural rights (hak asasi manusia) bahwa,⁴⁸ setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga negara seperti yang diberikan kepada laki-laki.

Menurut feminis liberal bahwa, setiap laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal, tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan negara diharapkan hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah pelanggaran hak asasi.⁴⁹

Feminis liberal berpendapat bahwa ada dua cara untuk mencapai tujuan ini, yaitu:

- a. Dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki.
- b. Dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.

Agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pelaksanaannya dapat terjamin, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminime liberal memfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi yang patriarki.

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, perjuangan kaum feminis sosial mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, feminis

⁴⁷A. Jagger, *Feminist Politics and Human Nature*, (Sussex: Harvester Press, 1983), h. 249.

⁴⁸Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah Pengantar Studi Permpuan*, *op.cit.*, h. 48.

⁴⁹Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective.....*, h. 7.

radikal memusatkan perhatian pada masalah seksualitas, feminis liberal memusatkan perhatian kepada pengembangan kemampuan dan rasionalitas. Kendatipun berbeda, tetapi intinya sama, yaitu mereka berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, persamaan yang pada akhirnya tidak akan terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.

A. Kekuasaan dan Sistem Pendidikan

Salah satu teks dari Hans J. Morgenthau dalam *Politics Among Nations* yang membahas tentang kekuasaan, mengandung pengertian “penguasaan manusia atas manusia lainnya”. Definisi ini merupakan hal yang lumrah dalam menjelaskan kekuasaan dalam perspektif ilmu politik. Nancy Hartsock mengajukan argumen bahwa tipe kekuasaan semacam “kekuasaan untuk mendominasi” ini selalu diindentikkan dengan maskulinitas, karena umumnya penerapan kekuasaan merupakan aktivitas yang bersifat maskulin. Selain itu, jarang sekali perempuan menerapkan kekuasaan yang dilegitimasi di dalam ranah publik. Ketika perempuan menulis tentang kekuasaan, mereka akan menekankan pada energi, kapasitas dan potensi. Harstock mencatat bahwa jika perempuan merancang teori, mereka akan menawarkan definisi yang sama, tetapi berbeda secara mendasar karena tidak identik dengan dominasi.⁵⁰

Oleh karena itu, kekuasaan atau politik memberikan pengaruh pada semua lini kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pendidikan. Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik *setting* sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Dalam suatu komunitas, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada basis kesukuan (*tribal-based societies*), misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan-keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu dan mencari ikan, metode-metode berperang dan sebagainya. Selain itu, mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara politis.⁵¹

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting

⁵⁰Lihat Sukawarsini Djelantik, “Gender dalam Hubungan Internasional” dalam Siti Hariti Sastriyani (ed), *Gender and Politics* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 102.

⁵¹Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 15-16.

yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam kehidupan masyarakat modern, pendidikan merupakan wilayah tanggungjawab pemerintah yang besar. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut memengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan di buat. Bahkan pendidikan sering “dipaksa” menyesuaikan diri dengan pola-pola administratif umum dan norma-norma yang berlaku. Implikasinya adalah pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah seperti bidang-bidang lainnya (baca; pertanian, kesehatan dan pelayanan sosial).⁵²

Oleh karena itu, pada umumnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Setiap pemerintah memposisikan prioritas pendidikan secara berbeda-beda dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik, karena semua lembaga pendidikan, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas.⁵³

Asumsi di atas memberikan makna bahwa politik atau kekuasaan adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldrige –sebagaimana dikutip M. Sirozi–, lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik.⁵⁴

Dengan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pendidikan, maka tidaklah sulit bagi negara untuk memposisikan pendidikan sebagai fungsi negara. Fungsi ini dapat dilihat pada eratnya keterkaitan antara elemen-elemen pendidikan publik di satu negara dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara tersebut. Ringkasnya, ada kaitan erat antara pendidikan publik dan negara.⁵⁵

Keterkaitan tersebut digambarkan dengan jelas oleh beberapa pakar, seperti Abernethy dan Coombe –sebagaimana dikutip M. Sirozy– yang mengatakan bahwa “‘education’.....refer to the school and university system under government control or supervision” (‘pendidikan’ merujuk pada sistem sekolah dan perguruan tinggi yang diawasi dan dikontrol oleh pemerintah). Dalam konteks ini menurut mereka, politik dapat dipahami melalui tiga pengertian. *Pertama*, politik adalah *activities focused on the acquisition and use of power through control of institutions of government* (berbagai aktivitas yang terfokus pada perebutan dan penggunaan

⁵²Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....* h. 17.

⁵³Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....*, h. 18-19.

⁵⁴Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....*, h. 20.

⁵⁵Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....*, h. 72.

kekuasaan melalui kontrol terhadap berbagai institusi pemerintah); *Kedua*, politik adalah “activities in which public issues are discussed and demands upon government expressed, through parties, interest groups, mobs, or solitary individuals” (berbagai aktivitas di mana isu-isu publik didiskusikan dan berbagai tuntutan terhadap pemerintah diekspresikan melalui partai-partai, kelompok-kelompok penekan, gerakan-gerakan, atau individu-individu penggugat); *Ketiga*, politik adalah “action of the formal institutions of government, which make laws, interpret them, and attempt to carry them out through a bureaucracy” (aksi-aksi dari berbagai institusi formal milik pemerintah yang menetapkan, menginterpretasikan dan menerapkan hukum melalui birokrasi).⁵⁶

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, setiap periode perkembangan pendidikan merupakan faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakekatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkuasa. Menurut Kartono, “kebijakan perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga nonedukatif lain, pembiayaan, dan manajemen pendidikan, semua diputuskan berdasarkan consensus dan keputusan politik pemerintah (yang nonedukatif sifatnya)”.⁵⁷

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa periode perkembangan yang dinamis dan memperlihatkan kompleksitas hubungan antara pendidikan dan politik. Setiap periode diindikasikan oleh adanya infiltrasi politik terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan dan implikasi sistem pendidikan terhadap dinamika politik. Sketsa penyelenggaraan pendidikan di negeri ini dapat dibagi menjadi enam periode perkembangan, yakni:⁵⁸

Periode Pertama, adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800-an. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai-nilai agama dan pengembangan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh-tokoh agama, Mereka memiliki otoritas penuh dan menentukan apa yang harus dipelajari, siapa yang berhak mengajarkan, bagaimana dan di mana pembelajaran dilakukan, dan siapa yang berhak dan tidak berhak atas program pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan menjadi bagian integral dari kegiatan keagamaan. Nilai-nilai agama menjadi acuan dasar penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kependidikan menjadi sarana utama untuk memahami, mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai agama.

⁵⁶Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....*, h. 73-74.

⁵⁷Lihat Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), h. 4.

⁵⁸Uraian tentang sketsa perkembangan pendidikan dalam uraian ini disarikan dan diadaptasikan dari M. Sirozi, *Politik Pendidikan:.....*, h. 186-189.

Periode Kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800-an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan kolonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Di satu pihak, pemerintah kolonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme. Kegiatan pendidikan diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai-nilai modernisasi dan sekularisasi di kalangan pribumi dan mencetak para pekerja yang dapat dieksploitasi untuk mendukung misi sosial, politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Di pihak lain, para aktivis gerakan kemerdekaan, baik dari kalangan agama maupun dari kalangan sekular, berusaha sekuat tenaga mendesain dan mengembangkan kegiatan pendidikan yang dapat membuka mata hati dan pikiran kaum pribumi terhadap berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap mereka sehingga memiliki kesadaran dan keberanian untuk bangkit melawan penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka serta berdaulat.

Periode Ketiga adalah periode pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Pada periode ini gerakan kemerdekaan sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan telah menjadi kekuatan politik yang cukup kuat untuk menentukan arah perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai-nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting perkembangan dunia pendidikan pada periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal. Kuatnya nilai-nilai nasionalisme dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan berhasil melahirkan aktivis-aktivis kemerdekaan dari kalangan pribumi dan membuat gerakan-gerakan sosial politik menjadi lebih terbuka.

Periode Keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah *nation and character building* dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideology Negara dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Periode Kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi

pelaksanaan pembangunan nasional. Karena sekularisasi menjadi salah satu strategi pembangunan nasional pada waktu itu, maka kegiatan pendidikan pada era ini banyak diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang mengarah pada sekularisasi pendidikan. Karena fokus utama pembangunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi, maka pelaksanaan kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Karena pendekatan pembangunan pada era ini cenderung bersifat indoktrinatif. Strategi, fokus dan pendekatan pendidikan tersebut dijalankan dengan paradigma sentralisasi. Pada periode ini Mendiknas adalah penguasa tunggal dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan pada era ini ditandai oleh biroraksi yang ketat dan berbelit-belit serta penyeragaman sehingga menghasilkan “keseragaman superfisial”. Pada akhir kekuasaan rezim Orde Baru, pendidikan di Indonesia belum menjadi wahana sosialisasi dan pembudayaan budaya bangsa; belum sejalan dengan perkembangan iptek; belum sejalan dengan tantangan era globalisasi; belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan kompetitif; dan belum mampu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak, berwatak ksatria, dan patriotik.

Periode Keenam adalah periode reformasi yang dimulai pada tahun 1998, seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Pada periode ini melahirkan semangat desentralisasi, demokratisasi dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi menjalar ke semua sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan sehingga menjadi menu utama penataan sistem pendidikan nasional.

Paparan di atas memberikan deskripsi yang sangat jelas tentang bagaimana relasi kekuasaan dan pendidikan. Karena kekuasaan selama ini didominasi oleh pihak laki-laki dan pandangan masyarakat yang memposisikan perempuan pada level subordinat, maka kebijakan-kebijakan pendidikan banyak mengandung bias gender. Meskipun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap wanita secara massif masih terjadi di segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik sebagai bagian dari kekuasaan.

Pada masa Orde Baru, institusi politik atau kekuasaan didominasi oleh pria sehingga ia berwajah maskulin. Dalam konteks ini, maka wanita yang terjun di bidang politik harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari rekan-rekannya politisi pria. Selain itu, wanita masih diharapkan untuk memerankan peran-peran yang secara gender telah ditetapkan sebagai peran wanita. Lebih berat lagi, wanita-wanita yang terjun ke dunia “publik” pada masa itu sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran-peran pria seperti label agresif dan ambisius.

Pada masa reformasi, pintu lebar terbuka untuk keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara termasuk bidang politik dan pendidikan. Dalam konteks politik, terdapat jumlah kuota 30% untuk perempuan yang harus dipenuhi setiap partai politik dalam proses pemilihan legislatif. Tetapi

dalam proses keterpilihannya, perempuan harus bersaing dengan laki-laki dan dalam konteks ini kadangkala perempuan tidak berdaya. Hegemoni laki-laki yang didukung oleh dana dan intrik-intrik politik menyebabkan perempuan tidak terpilih.

Dalam konteks politik kekinian, perempuan-perempuan yang menjadi srikandi senayan tidak juga menunjukkan kerja-kerja positif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Bahkan yang ironi, beberapa anggota legislatif dari unsur perempuan malah harus berurusan dengan hukum akibat perilaku korup yang mereka lakukan. Hal ini semakin menjatuhkan martabat kaum perempuan dalam dunia politik atau kekuasaan.

Namun, bagi Zohra Andi Baso –aktivis perempuan Internasional asal Sulawesi Selatan—ia mengkritik pemberitaan media tentang perempuan yang terlibat korupsi. Baginya, media terlalu mengeksploitasi perempuan yang sudah terlanjur masuk dalam persoalan korupsi politik di negeri ini. “Memang diakui, ada perempuan yang terlibat karena masuk ke ruang maskulin”. Ruang maskulin yang ia maksudkan adalah korupsi yang selama ini didominasi laki-laki, belakangan juga di masuki oleh perempuan. Hal ini terutama setelah kuota wajib 30 persen bagi perempuan untuk setiap struktur partai politik. Akibatnya, ruang untuk terjun dalam dunia politik terbuka, juga dimasuki oleh kaum perempuan. Mereka juga akhirnya terlibat dalam pembahasan yang terkait dengan publik. Perempuan juga mulai memiliki posisi yang strategis, terutama karena terkait dengan hak pembahasan anggaran. Celakanya, banyak perempuan yang masuk dalam kepemimpinan maskulin, sehingga menyerap watak-watak seperti itu.⁵⁹

Bukan hanya Andi Zohra Baso, semua pembicara dalam diskusi “Perempuan dalam Pusaran Politisasi” yang diselenggarakan Harian Fajar seperti Sunarti Sain (Pemimpin Redaksi Radar Selatan), dan Sri Rahmi (Politisi Partai Keadilan Sejahtera) semuanya mengkritik media dan membela kaumnya, perempuan. Bagi Sunarti Sain, perempuan yang masuk dalam pusaran politik dan korupsi, merupakan isu yang menarik bagi media. Olehnya itu, banyak di *blow-up* oleh media ketika terkait dengan politikus perempuan yang korupsi. Media memang kadang kebablasan karena semua media massa sangat maskulin, lebih banyak laki-laki di dalamnya. Sedangkan bagi Sri Rahmi, ketika perempuan yang muncul dalam lingkaran korupsi politik, maka ia akan menjadi bulan-bulanan media. Ia mengatakan, isu tentang perempuan korupsi, terlihat menarik atau cukup seksi bagi media. Itu bahan eksploitasi bagi media untuk mem*blow-up* masalahnya.⁶⁰

Dalam pandangan penulis, apa yang menimpa para politisi perempuan tidak perlu dibela. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa Tuhan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; jika laki-laki korupsi, maka perempuan juga bisa. Terdapat potensi yang sama pada diri laki-laki dan perempuan, yang dalam bahasa al-Qur’an adalah potensi *furu>r* dan *taqwa* (QS. al-

⁵⁹“Perempuan Terjebak Korupsi” (Liputan), *Fajar*, 5 Januari 2014.

⁶⁰*Fajar*, 5 Januari 2014.

Syams/91:8). Kedua potensi inilah yang menentukan baik buruknya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dalam bimbingan wahyu dan akal.

Penulis berpandangan bahwa perjuangan perempuan tidak harus dilakukan oleh perempuan, tetapi bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan politik selama laki-laki telah memposisikan perempuan dalam frame yang benar sehingga siap memperjuangkan hak-hak perempuan. Persoalan terbesar dari segala kebijakan politik adalah ketidaksiapan laki-laki untuk menerima dan memperjuangkan kaum perempuan. Perempuan masih dianggap sebagai musuh yang akan mengganggu kenyamanan hidup laki-laki. Bahkan boleh jadi, telah menjadi pikiran bawah sadar kaum laki-laki bahwa perempuan itu dunianya adalah dunia domestik yang hanya mendukung kerja laki-laki di dunia publik.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa sistem pendidikan sebuah masyarakat atau bangsa sangat berkorelasi positif dengan sistem politik atau kekuasaan. Namun demikian, meskipun kebijakan politik atau kekuasaan telah menjadikan gender sebagai salah satu strategi pembangunan, tetapi implementasinya tidak semudah menetapkan kebijakan itu. Gerakan dan aksi dalam konteks sosial dan budaya sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat laki-laki.

B. Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender

Kata pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *paedagogi*, terdiri atas dua suku kata yakni *paes* yang berarti anak, dan *again* yang berarti membimbing. Jadi *paedagogi* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.⁶¹ Dengan demikian pendidikan dalam bahasa Yunani adalah usaha membimbing, mengarahkan, dan membina anak-anak (peserta didik). Dari pengertian ini, kemudian ditemukan definisi lebih lanjut bahwa pendidikan adalah mempengaruhi dan mengusahakan anak supaya menjadi dewasa dengan cara membimbingnya. Boleh juga dikatakan bahwa pendidikan adalah membantu anak supaya tumbuh berkembang dan kelak menjadi cakap. Definisi yang lebih luas lagi, memberi tuntunan kepada anak yang belum dewasa menjadi dewasa agar tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaniannya, pendidikan ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup.

Definisi etimologis di atas menunjukkan bahwa objek pendidikan adalah anak. Demikian halnya karena anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, dan penting sekali dimulai sedini mungkin, sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat dirinya. Dengan demikian, pendidikan adalah upaya pembentukan kepribadian

⁶¹Lihat Abu Ahmadi Nur dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 70. Batasan pendidikan secara etimologis, dapat pula dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 262.

yang lebih matang. Dalam konsep Islam, kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian muslim yang ideal.

Kemudian pendidikan secara terminologi, banyak dikemukakan para pakar dalam berbagai defenisinya masing-masing, misalnya:

1. John S. Brubacher:

*Education should be thought of the process of man's reciprocal adjustment to nature, to his fellows, and to the ultimate nature of the cosmos. Education is the organized development and aqipment of all the powers a human being, moral, intelectual, and phycical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of yhese activities with their creator as their final end.*⁶²

Artinya:

Pendidikan adalah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Pendidian juga merupakan perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (fisik), oleh dan untuk kepribadian individualnya dan kegunaan masyarakatnya yang diharapkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan akhir hidupnya.

2. Joe Park : *"Education the art of proccess of imparting or acquiring knowledge an habit through instrutional as strudy"*.⁶³ Dalam defenisi ini, tekanan pengertian pendidikan adalah pada kegiatan pengajaran (*instruction*), dan kepribadian yang dibina dari aspek kognitif dan kebiasaan.

3. John Dewey, sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Uhbiyati :

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.⁶⁴

4. Redja Mudyahardjo :

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan, dan sepanjang hidup di segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.⁶⁵

5. Burhanuddin Salam :

⁶²John S. Brubacher, *Modern Philosophis of Education* (New Delhi: Tata Graw-Hill Publishing Company LTD, 1981), h. 371.

⁶³Joe Park, *Selected Reading in The Philosophy of Education* (New York: The Macmillang Companiy, 1970), h. 3.

⁶⁴Abu Ahmadi dan Uhbiyati, *op. cit.*, h. 69.

⁶⁵Lihat Redja Mudyahardjo, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 3.

Pendidikan adalah suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup.⁶⁶

6. Ahmad D. Marimba :

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁶⁷

7. Mappanganro :

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menambah kecakapan, keterampilan, pengertian, dan sikap melalui belajar dan pengalaman yang diperlukan untuk memungkinkan manusia mempertahankan dan melangsungkan hidup, serta untuk mencapai tujuan hidupnya.⁶⁸

8. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab 1 ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁹

Sedangkan pengertian pendidikan Islam dikemukakan antara lain Yusuf Qardawi --sebagaimana dikutip Azyumardi Azra-- memberi pengertian pendidikan Islam yaitu pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis pahitnya.⁷⁰ Sedangkan Azyumardi Azra mendefinisikan pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah swt. kepada Muhammad saw.⁷¹

Endang Saefuddin Anshari memberi pengertian secara lebih teknis, pendidikan Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntunan dan usulan) oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi), dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka

⁶⁶Lihat Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 4.

⁶⁷Lihat Ahmad D. Marimba, *Pengantar Pendidikan Islam* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1972), h. 15.

⁶⁸Lihat Mappanganro, *Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah* (Cet. I; Ujung Pandag: Yayasan Ahkam, 1996), h. 9

⁶⁹UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

⁷⁰Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 5.

⁷¹Lihat Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1998), h. 5.

waktu tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai ajaran Islam.⁷²

Sedangkan menurut hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai: "Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam."⁷³

Sedangkan Prof. Mappanganro, mengemukakan pendidikan Islam merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengasuh anak atau peserta didik agar dapat meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁴

Sehubungan dengan itu, Prof. M. Arifin, juga menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.⁷⁵

Dari pengertian pendidikan Islam di atas, memberikan pemahaman yang utuh terhadap makna Pendidikan Islam itu sendiri, yakni upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan, asuhan kepada anak didik atau generasi muda agar mereka memahami dan menghayati ajaran-ajaran Islam agar nantinya mereka dapat mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya, demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Dari pengertian pendidikan Islam itu sendiri, melahirkan berbagai interpretasi yang termuat di dalamnya. Yakni, adanya unsur-unsur edukatif yang sekaligus sebagai konsep bahwa pendidikan itu merupakan suatu usaha, usaha itu dilakukan secara sadar, usaha itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada masa depan anak, usaha itu mempunyai dasar dan tujuan tertentu, usaha itu perlu dilaksanakan secara teratur dan sistimatis, usaha itu memerlukan alat-alat yang digunakan.

Dapatlah dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan suatu tabiat yang sekaligus amanat yang harus diperkenalkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama dari orang tua atau pendidik kepada anak-anak dan murid-muridnya. Dalam hal ini, konsep pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Artinya, manusia tidak merasa keberatan atas ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

⁷²Lihat Endang Saefuddin Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam*, (Jakarta: Usaha Enterprise, 1976), h. 85.

⁷³Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 15.

⁷⁴Mappanganro, *Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah* (Ujungpandang: Yayasan Ahkan, 1996), h. 10.

⁷⁵M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 10.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang pendidikan dan pendidikan, maka tampak bahwa terdapat perbedaan antara pengertian pendidikan secara umum dengan pendidikan Islam. Pendidikan secara umum merupakan proses pemindahan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan tersebut dalam hal nilai-nilai yang dipindahkan (diajarkan). Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai yang dipindahkan berasal dari sumber-sumber nilai Islam yakni Al-Qur'an, Sunah dan Ijtihad.

Dengan kata lain, pendidikan mengandung suatu pengertian yang sangat luas, dan menyangkut seluruh aspek kepribadian dan kehidupan manusia yang pada intinya terjadi proses pendewasaan, dan pematangan manusia untuk lebih menjadi dewasa. Sedangkan pendidikan Islam merupakan proses bimbingan baik jasmani dan rohani berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim sesuai dengan ukuran-ukuran Islam.

Pendidikan Islam, dengan segala bentuknya, mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan menentukan. Melalui upaya pendidikan Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dapat diberikan kepada anak didik, yang kelak akan menjadi anggota dan pemimpin masyarakat.

Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk mengantar para peserta didik untuk mengabdikan dirinya secara totalitas kepada Allah, dengan membina seluruh potensi yang dimiliki manusia yaitu potensi spiritual, intelektual, perasaan, kepekaan dan sebagainya.

Tujuan pendidikan yang disebutkan di atas, nampak sejalan dengan pandangan Muhammad Amin, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata bahwa pendidikan mencakup berbagai dimensi, badan, akal, perasaan, kehendak, dan seluruh unsur atas kejiwaan manusia serta bakat-bakat kemampuannya. Pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan individual, sehingga potensi kejiwaan itu dapat diaktualisasikan secara sempurna. Potensi-potensi itu pada dasarnya merupakan kekayaan yang berharga dalam diri manusia.⁷⁶

Manusia tanpa memandang jenis kelamin, dalam hidupnya memerlukan pendidikan, dan karena itu ia harus mempergunakan alat-alat potensial pada dirinya untuk senantiasa mengembangkan pemikirannya akan kemajuan pendidikan, sebagaimana di dalam Q.S. al-Nahl/16:78 Allah swt. berfirman:

(78) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.⁷⁷

⁷⁶Lihat Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 51

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kutab Suci al-Qur'an, 1992), h. 413.

Klausa “ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ” dalam ayat di atas mengandung makna bahwa manusia saat dilahirkannya, tidak mengetahui yang tidak diketahuinya itu, maka Allah SWT memberikan alat potensial berupa *al-sam'u* (pendengaran), *al-abshara* (penglihatan), dan *al-afidah* (hati untuk memahami). Potensi ini dimiliki oleh semua manusia tanpa mendiskriminasi jenis kelamin. Dengan kata lain, ada kesetaraan gender dalam pemberian potensi pada manusia untuk belajar dalam pendidikan.

Kata *al-sam'u* dan *al-abshara* dalam arti indera manusia, ditemukan dalam Al-Quran secara bergandengan sebanyak tiga belas kali.⁷⁸ Kata *al-sam'u* selalu digunakan dalam bentuk tunggal, dan selalu mendahului kata *al-abshara*. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa *al-sam'u* sebagai salah satu alat indera manusia memiliki posisi penting bagi manusia itu sendiri dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Setelah kedua kata tadi, disebutkan lagi *al-afidah* yang juga merupakan bentuk jamak. Ini berarti bahwa banyak pengetahuan yang dapat diraih setiap orang, namun sebelumnya ia harus menggunakan pendengarannya dan penglihatannya terlebih dahulu secara baik.

Dengan peralatan indrawi berupa penglihatan, pendengaran dan hatinya, manusia memiliki potensi untuk dapat mengenal agama secara baik dan membentuk sikap keberagamannya secara dinamis, sesuai dengan *fitrah*-nya dengan jalan taqwa dan berbudi luhur atau berakhlak mulia.

Pada fisik setiap manusia, terdapat potensi-potensi tenaga fisik yang bila benar pengembangannya akan menjadi tenaga fisik yang kuat dan dibentuk menjadi kecakapan kerja untuk mengolah dan memanfaatkan pemberian Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Dengan kata lain, Allah telah menganugrahi manusia dengan kemampuan yang dengannya mereka dapat menguasai alam semesta yang telah diperuntukkan Allah bagi manusia.⁷⁹

Pada aspek psikis setiap manusia terdapat potensi-potensi kejiwaan yang bila benar dalam penumbuhan dan pengembangannya akan terbentuk menjadi kecakapan berfikir ilmiah dalam mencari dan menemukan kebenaran, bercita-cita yang luhur dan mulia, berkemampuan membawakan diri dengan jitu sekali sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, baik dalam hubungan dengan Allah, maupun dalam hubungan dengan sesama manusia ataupun dalam hubungan dengan benda/alam.⁸⁰ Dalam hal ini, bagi mereka yang mengerti agama dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan; sebaliknya, bagi mereka yang akhlaknya merosot biasanya keyakinannya terhadap agama, kurang atau tidak sama sekali.⁸¹

⁷⁸Lihat Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqi, *op. cit.*, h. 456-457.

⁷⁹Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuhua fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama'* diterjemahkan oleh Shibabuddin dengan judul *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 40.

⁸⁰Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam* (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 48.

⁸¹Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 12.

Selain itu, Allah swt. memberi pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia, agar dipergunakan untuk merenung, memikirkan, dan memperhatikan apa-apa yang ada di sekitarnya. Kesemuanya ini, merupakan motivasi bagi segenap umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan melalui jalur pendidikan, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sejak kecilnya sampai berusia lanjut tanpa tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini, didasarkan atas ungkapan yang oleh sementara pakar pendidikan dianggap sebagai hadis Nabi saw, yaitu ⁸² *أطلب العلم من المهد الى اللحد* (Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat). Lebih dari itu, ditemukan pernyataan Nabi saw yang mensejajarkan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Redaksi hadis tersebut, adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رواه الترمذی)⁸³

Terjemahnya:

Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka yang bersangkutan berada di jalan Allah sampai ia kembali dari kegiatan menuntut ilmu. (HR. Turmuziy)

Menurut Muh Anis Malik dan La Ode Ismail Ahmad, term *fi sabilillah* dalam hadis di atas dapat dimakna dalam pengertian jihad dan kebajikan. Menuntut ilmu dapat tergolong *fi sabilillah* dalam makna jihad, yakni perang melawan kebodohan yang merupakan penyakit umat Islam hari ini. Sedangkan menuntut ilmu dapat dikategorikan *fi sabilillah* dalam makna kebajikan untuk mendekatkan diri kepada ridha Allah, karena orang yang berilmu akan semakin *khasyah* kepada Tuhan-Nya sehingga ia semakin memperbanyak kebajikan dengan ilmunya.⁸⁴

Di samping nas-nas yang berkenaan dengan urgensi pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan, masih banyak ditemukan firman Allah swt. maupun hadis Nabi saw. yang secara implisit sangat sejalan dengan nas-nas tersebut. Itu berarti bahwa pendidikan Islam bagi setiap muslim merupakan kewajiban tanpa membedakan jenis kelamin.

Pendidikan di samping sebagai kewajiban, mutlak dibutuhkan oleh setiap muslim untuk kepentingan eksistensinya. Jadi pendidikan perspektif Islam tidak dipandang sebelah mata. Ia harus senantiasa dipikirkan dan dikembangkan sejalan dengan adanya pembaruan pemikiran pendidikan dewasa ini.

Istilah pengembangan, tidak dapat dipisahkan dengan istilah pembaruan. Pembaruan berarti suatu perubahan baru, sedangkan pengembangan adalah

⁸²Hadis di atas, memang penulis tidak menemukannya dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, tetapi telah menjadi masyhur di kalangan masyarakat dan sering dikemukakan para pakar pendidikan sebagai dalil tentang urgensi pendidikan Islam.

⁸³Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, dalam CD. *Rom Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Kitab al-'Ilm* hadis nomor 2571.

⁸⁴Lihat Muh. Anis Malik dan La Ode Ismail Ahmad, *Memahami Mutiara Hadis Nabi Muhammad saw.* (Cet. I; Surakarta: Zadahana Publishing, 2013), h. 90.

menjadikan sesuatu lebih sempurna dari yang sebelumnya.⁸⁵ Pembaruan adalah upaya untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia, baik pengembangan jasmani maupun rohani, maka potensi pengembangan itu, harus dibina melalui pendidikan Islam, dan praktis bahwa pendidikan Islam harus pula mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Umar Tirtaharja dan La Sula menyatakan bahwa peserta didik dalam upaya pengembangan potensi-potensi kemanusiaannya.⁸⁶

Dalam perspektif al-Quran, manusia berkembang bermula dari proses kejadiannya. Ayat yang berbicara tentang proses kejadian manusia dapat ditemukan dalam QS al-Mu'minun/23: 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang Paling Baik.⁸⁷

Ayat lain yang juga berbicara tentang proses penciptaan manusia adalah QS al-Haj/22: 5; QS al-Sajadah/32: 8-9; QS al-Mu'min/40: 67; QS al-Najm/53: 32; QS al-Insan/76: 2; QS al-Thariq/86: 5-7. Sebenarnya masih banyak ayat yang mengungkap tentang proses kejadian manusia, namun cukup dengan mengemukakan ayat di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa masalah pendidikan relevan dengan eksistensi manusia dan perkembangannya. Melalui ayat tersebut, terungkap bahwa Allah swt. memperlihatkan kehebatan dan keagungan-Nya dalam menciptakan manusia. Karena itu, pendidikan Islam berfungsi antara lain mengarahkan kepada penghayatan terhadap tanda-tanda kehebatan dan keagungan Allah swt. Di ayat tadi, dijelaskan bahwa penciptaan manusia melalui beberapa tahap, yakni penciptaan fisik yang dimulai dari *nut{fah* (air mani), kemudian *alaqah* (segumpal darah), *mud{gah* (segumpal daging), *'iz{am* (tulang belulang), *lahm* (daging yang membungkus tulang), setelah itu

⁸⁵Lihat Bahaking Rama, *Jejak Pembaruan Pendidikan Pesantren* (Cet. I; Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003), h. 19.

⁸⁶Lihat Umar Tirtaharja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 1.

⁸⁷Departemen Agama, *op. cit.*, h. 343.

ditiupkanlah roh sebagai unsur psikis. Pada saat itulah manusia memiliki potensi fitrah dan menjadilah ia manusia yang utuh dan sangat baik bentuknya (*fi> ahsan takwin*). Bila hal ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka dipahami bahwa untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, diperlukan beberapa proses pengembangan dan tahapan-tahapan dalam pendidikan.

Manusia diharapkan mampu untuk berdaya upaya, mengembangkan segala kreatifitas dan potensi pada dirinya melalui proses pendidikan secara bertahap. Hal ini berarti bahwa setiap manusia, harus senantiasa mengaktifkan dirinya dalam dunia pendidikan di mana pun dan kapan pun tanpa ada batas ruang dan waktu yang mengitarinya.

Dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam dalam melakukan pendidikan, secara integral obyeknya ditujukan kepada manusia, sehingga tidak akan tertinggal dan terabaikan, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik kehidupan secara mutlak maupun segala kegiatan di alam *syahadah* ini (bumi). Islam memandang manusia secara totalitas, atas dasar fitrah yang diberikan dari Allah kepada hambaNya, tidak sedikit pun yang diabaikan dan tidak memaksa apapun selain apa yang dijadikanNya sesuai dengan fitrahnya.⁸⁸ Pandangan ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi manusia secara serasi dan seimbang.

Terkait dengan itu, maka seluruh potensi yang dimiliki manusia diharapkan dapat berfungsi sebagai pengabdian dan sebagai khalifah di bumi ini. Atas dasar itu M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Alquran (Islam) adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga manusia mampu menjalankan khalifahNya,⁸⁹ guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata lain untuk bertakwa kepada Allah swt.

Dengan demikian, pendidikan harus mampu membina, mengarahkan dan melatih semua potensi jasmani, jiwa dan akal manusia secara optimal agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai "khalifah". Di samping itu, mengisyaratkan perlunya perencanaan tujuan pendidikan yang sesuai dengan situasi masyarakat.

Secara khusus khusus Pendidikan Islam, dapat dikaitkan dengan tujuan keagamaan itu sendiri yang meliputi (1) pembinaan akhlak; (2) menyiapkan anak didik untuk hidup dunia dan akhirat; (3) penguasaan ilmu; dan (4) keterampilan bekerja dalam masyarakat.⁹⁰

Selanjutnya Munir Mursi berpendapat, tujuan khusus pendidikan keagamaan dapat dirinci atas; (1) tujuan pendidikan keagamaan; (2) tujuan

⁸⁸Muhammad Qutb, *Thariqah al-Tarbiyah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Salman Harun dengan judul *Sistem Pendidikan Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th), h. 27

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1992), h. 173.

⁹⁰M. Athiyyah al-Abrasy, *al-Tarbiyah Islamiyah* yang diterjemahkan oleh Bustami A. Gani *et. all.*, dengan judul *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 1.

pembangunan akal dan akhlak; (3) tujuan pengajaran hitungan; dan (4) tujuan pembinaan kepribadian.⁹¹

Dari uraian di atas maka, dapat diketahui bahwa tujuan khusus pendidikan keagamaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengarahkan manusia menjadi khalifah yakni melaksana-kan tugas untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
2. Mengarahkan manusia dalam melaksanakan tugas kekhalfahan itu, dalam rangka beribadah kepada Allah swt.
3. Mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, sehingga lenceng dari fungsi kekhalfahan.
4. Mengarahkan semua potensi manusia (akal, jiwa dan fisik) untuk memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan dalam rangka mendukung tugas pengabdian dan fungsi kekhalfahannya.

Tujuan tersebut, kemudian ahli pendidikan Islam, dijadikannya sebagai tujuan umum pendidikan Islam. Dalam kaitan ini, Ahmad Tafsir mengatakan bahwa untuk keperluan pelaksanaan pendidikan keagamaan sebenarnya ada yang bersifat umum, khusus, dan operasional.⁹² Penjabaran tujuan umum atau tujuan akhir pendidikan Islam yang menjadi tujuan khusus ini, menuntut kepada segenap manusia untuk mengabdikan dirinya secara totalis kepada Allah swt.

PENUTUP.

Dari uraian di atas, maka pendidikan Islam dalam pengembangannya harus sejalan dengan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia dalam menerima pendidikan tanpa membedakan gender. Proses pendidikan Islam di sini pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam. Namun timbul pertanyaan, apa saja yang menjadi aspek-aspek kehidupan itu. Dalam konteks inilah pemikir dan pengembang pendidikan Islam mempunyai konsep dan paradigma yang berbeda-beda tentang pengembangan pendidikan Islam. Perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari latarbelakang sosiokultural yang mengitarinya, terutama sistem politik yang sedang berjalan

⁹¹Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyah Ushuluha wa Tathawwuruha Fi al-Bilad 'Arabiyah* (Cet. IV; t.tp: Dar al-Ma'arif, 1987), h. 54.

⁹²Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) h. 49

DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrasy, M. Athiyyah. *al-Tarbiyah Islamiyah* yang diterjemahkan oleh Bustami A. Gani *et. all.*, dengan judul *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam*, Jakarta: Usaha Enterprise, 1976.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, .
- Azra, Azyumardi. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1998.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ba'albakiy, Munir. *al-Maurid: Qamus Injilizhiy Arabiy* Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1985
- Brubacher, John S. *Modern Philosophis of Education* New Delhi: Tata Graw-Hill Publishing Company LTD, 1981.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama* Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1978..
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fakih, Mansour. *et.al, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* Cet. I: Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality : An Introduction*, New York: Pantheon, 1978.
- Freud, Sigmund. "Some Psychological Consequences of Anatomical Distinction Between the Sexes," dalam J. Strachey ed., *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, London: Hogart Pressa and the Institute of Psycho-Analysis, Vol. 19
- <http://.www.gender.or.id>.
- Ihrami, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Illich, Ivan. *Gender*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul *Gender* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Jagger, A. *Feminist Politics and Human Nature*, Sussex: Harvester Press, 1983
- Kamla, Bashin. *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Cet. I; Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996
- Kantor Menteri Negara Urusan peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992.
- Kartono, Kartini. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.

- Lindsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983
- Malik Muh. Anis. dan La Ode Ismail Ahmad, *Memahami Mutiara Hadis Nabi Muhammad saw.* Cet. I; Surakarta: Zadahannya Publishing, 2013.
- Mappanganro, *Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah* Cet. I; Ujung Pandag: Yayasan Ahkam, 1996.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Pendidikan Islam* Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1972.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* Bandung: Mizan, 1999
- Mosses, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, terjemahan Hartian Silawati dengan judul *Gender dan Pembangunan* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Ilmu Pendidikan* Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Mursi, Muhammad Munir. *al-Tarbiyah Ushuluha wa Tathawwuruha Fi al-Bilad 'Arabiyah* Cet. IV; t.tp: Dar al-Ma'arif, 1987.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan* Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nur, Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Nye, F.Ivan. *Role Structure an Analisis of the Family*, California & London: Sage Library of Social Research, 1976
- Park, Joe. *Selected Reading in The Philosophy of Education* New York: The Macmillang Company, 1970
- Rama, Bahaking. *Jejak Pembaruan Pendidikan Pesantren* Cet. I; Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003.
- Salam, Burhanuddin. *Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik* Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Salim, Peter. *Advance English-Indonesia Dictionary*, edisi ketiga Jakarta: Modern English Press, 1991
- Sastriyani. Siti Hariti. ed, *Gender and Politics* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009
- Shapiro, Harry L. *Man Culture and Society*, New York: Oxford University Press, 1971.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Cet. II; Bandung: Mizan, 1992.
- Showalter, Elaine. *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Somad, Burlian. *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam* Bandung: Alma'arif, 1997.

- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Tierney ed., Helen. *Woman's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York: Green Wood Press
- Tirtaharja Umar. dan La Sula, *Pengantar Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2001..
UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- Webster's New world Dictionary*, New York: Websters New world Cleveland, 1984.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic* Cet. III; London: McDonald & Evans Ltd, 1980
- Wilson, H.T. *Sex and Gender, Making Culture Sense of Civilization*, Leidan, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989